

proseding_nasonal11.pdf

by Faperta UIR Agribisnis

Submission date: 02-Feb-2024 02:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 2284412879

File name: proseding_nasonal11.pdf (16.46M)

Word count: 4480

Character count: 30278



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

“REFORMASI DAN INOVASI
TATA KELOLA PEMERINTAHAN”

SAMARINDA, 24-25 NOVEMBER 2016

**Prosiding Seminar Nasional
Reformasi dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan**

Penulis:

FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

ISBN: 978-602-60786-0-5

Editor:

**Budiman
Rita Kalalinggi
Burhanudin
Jauchar B**

Desain Sampul:

Reza Pahlefy

Penerbit:

FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

Redaksi:

**Jl. Tana Grogot Samarinda
75119
Telp. (0541) 738532**

Kata Pengantar

Salah satu perbedaan mendasar system pemerintahan, antara masa orde baru dengan saat ini adalah terpisahnya kekuasaan. Bila di masa lalu bersifat sentralistis, di mana semuanya dipusatkan di Jakarta, kini sebagian kekuasaan dialihkan ke daerah. Desentralisasi lebih diutamakan, daerah diberikan ruang untuk mengelola dan mengurus daerahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan pembaruan diberbagai sector sebagai suatu langkah untuk mengatasi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Inovasi menjadi solusi dan keharusan yang mesti dilakukan agar keberadaan pemerintah menjadi bermakna di mata rakyatnya. Inovasi tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan tetapi juga untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah. Diperlukan adanya daya inovatif pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan melalui pembangunan. Sudah lebih dari sepuluh tahun program desentralisasi ini dijalankan, program ini diharapkan bisa menjadi tata kelola pemerintahan daerah lebih maju, dan tentu saja kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Namun program yang sedari awal ditanggapi positif oleh berbagai kalangan, ternyata belum berjalan sebagaimana diharapkan.


Banyak sekali indikasi yang menunjukkan, bahwa tata kelola di daerah masih bermasalah. Misalnya reformasi internal birokrasi pemerintahan belum berjalan maksimal, dan yang lebih disayangkan aspek pelayanan public juga bermasalah. Pertanyaan bagaimana melakukan reformasi dan inovasi tata kelola pemerintahan agar terwujud pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna di Indonesia

Prosiding Seminar Nasional dan Pertemuan APSIPI "Reformasi dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan"

menjadi topik yang menarik untuk diangkat dan didiskusikan dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam sebuah forum seminar nasional.

Samarinda, 20 November 2016

Ketua Panitia



Dr. Rita Kalalinggi, M.Si

KATA SAMBUTAN

Puji syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan perkenanNya jualan maka pertemuan Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (APSIPI) dapat terlaksana.

Pertemuan ini diisi dengan acara Seminar Nasional dengan pembicara Budi Santoso (KPK), Prof. Dr. Bahrullah (BPK), Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si (Rektor Unmul), Drs. Yusran Aspar, M.Si (Bupati Penajam Paser Utara), dan Dr. Teguh Yuwono, M.Pol, Admin (APSIPI), yang mengangkat beberapa tema yang menjadi isu sentral di masyarakat seperti reformasi birokrasi pemerintahan, Inovasi tata kelola Pemerintahan, Efektivitas Teknologi Informasi dan Media, Transparansi dan akuntabilitas serta anti korupsi, Kepemimpinan pemerintahan serta Sinergitas pemerintah, actor privat dan masyarakat sipil.

Guna menambah semaraknya nuansa keilmuan pada acara pertemuan APSIPI ini, panitia juga memberikan kesempatan kepada seluruh anggota atau peserta pertemuan APSIPI untuk menyampaikan paper yang dipresentasikan pada acara Seminar Nasional *call for paper*, Kamis tanggal 24 November 2016. Seminar ini diikuti oleh 58 *presenter* dan 70 partisipan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, birokrat, praktisi, pemerhati pemerintahan dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

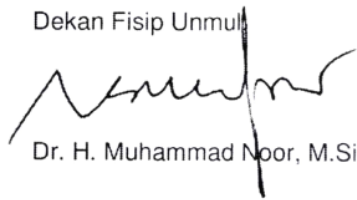
Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Rektor Universitas Mulawarman, yang telah memberikan restu untuk pelaksanaan acara ini, begitu juga kepada Walikota Samarinda, yang begitu antusias mendukung pelaksanaan acara ini. Terima kasih dan penghargaan mendalam disampaikan kepada Ketua dan seluruh jajaran APSIPI yang telah memberikan kesempatan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara ini. Juga kepada seluruh peserta yang menyampaikan paper sekaligus mempresentasikannya di acara ini, kami mengucapkan terima kasih. Tidak lupa, kepada seluruh panitia pelaksana acara pertemuan APSIPI, kami sangat berterima kasih atas semua usaha dan kerja kerasnya.

Prosiding Seminar Nasional dan Pertemuan APSIPI "Reformasi dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan"

Tentu kita semua berharap pertemuan APSIPI yang dirangkai dengan acara seminar nasional dan presentasi full paper ini memberikan makna mendalam serta pencerahan, khususnya dalam kancah Ilmu Pemerintahan, bagi kalangan akademisi maupun para birokrat pemerintahan.

Samarinda, 20 November 2016

Dekan Fisip Unmul

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Noor', written over a vertical line.

Dr. H. Muhammad Noor, M.Si

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Kata Sambutan.....	iii
Daftar Isi.....	v
A. Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat	
Kegagalan Reformasi Birokrasi Negara Berkembang: Critical Teori Sound Governance Terhadap Good Governance (Ali Azham Burhani & Eki Darmawan).....	1
Kebijakan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Bekasi (Aos Kuswandi).....	20
Analisis Metodologi Ilmu tentang Pemerintahan Reformatif di Indonesia (Pipin Hanapiah).....	39
Penataan Dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Menurut Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Di Kota Bogor Prop. Jawa Barat (Fernandes Simangunsong).....	54
Mentransformasi Organisasi Publik Menjadi Learning Organization (Agus Joko Purwanto).....	91
Profesionalisme Aparat dan Kapasitas Kelembagaan dalam Pelayanan Publik (Rahman Mulyawan, Dede Mariana).....	105
B. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan pada Tingkat Pemerintahan Nasional, ataupun Desa	
Inovasi Model Kebijakan Pembangunan Desa (Melly Maulin, Purwaningwulan, Dewi Kurniasih, Irawan Afrianto).....	118
Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Pada Tingkat Pemerintahan Nasional Ataupun Desa; Analisa Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Kampung Yiwika (Siti Khikmatul Rizki).....	133
Pengelolaan BUMDES Melalui Good Governance Studi Kasus: Bumdes Tirta Mandiri Desa Ponggok Klaten Jawa Tengah (Tia Subekti).....	153

Seminar Nasional dan Pertemuan APSIPI “ Reformasi dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

Memperkuat Partisipasi Perempuan Di Desa (Sisi Lain Inovasi Tata Kelola Pemerintahan (Ane Permatasari)	179
Melembagakan Peran Partai Politik Dalam Membentuk Good Local di Level Pemerintahan Desa (Ahmad Zaki Fadlurrohman).....	190
Inovasi Pemerintah Daerah Melalui Pembangunan Assesment Center Di Kota Bandung (Dede Sri Kartini, Nandang Alamsyah Deliar Noor, Hery Wibowo, Rudiana)	210
Inovasi Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar (Muchlas M.Tahir, Zulfan Nahrudin)	234
Kota Wisata Batu, Branding Pembentuk Entitas Warga Kota Batu (Restu Karlina Rahayu)	252
Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Industri Gerabah Di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan (Ihyani Malik).....	275
Perencanaan Mewujudkan Kehidupan Pemerintahan dan Sosial Yang Islami Di Desa Tonrong Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang (Ahmad Mustanir).....	289
Optimalisasi Desentralisasi Ekonomi Pengelolaan Pajak Hiburan Pasca Implementasi PermenKeu No.158 Thn 2015 (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Batu) (Hevi Kurnia Hardini)	308
Proses Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Eks Kusta dalam Program Makassar Tidak Rantasa Di Dinas Sosial Kota Makassar (Elya Septiani, Nuryanti Mustari)	332
C. Transparansi, Akuntabilitas, dan Anti Korupsi Tata Kelola Pemerintahan	
Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Upaya Transparansi, Akuntabilitas dan Pencegahan korupsi (Kiki Endah, Endah Vestikowati, dan Agus Nurulsyam Suparman).....	354
Model Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa Suranto, Dyah Mutiarin, Awang Daru Murti	373

Seminar Nasional dan Pertemuan APSIPI " Reformasi dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

Dimensi Etika Pemerintahan Dalam Good Governance (H. Utang Suwaryo).....	399
Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Demokrasi Kontekstual (Urbanus Ola)	419
Analisis Kinerja Keuangan Daerah dalam Optimalisasi Capaian Perencanaan Pembangunan (Lukman Hakim, Ahmad Imron Rozuli, Aswin Ariyanto Aziz)	443
). Kepemimpinan Pemerintahan dalam Reformasi dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	
Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Reformasi dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Di Era Otonomi Khusus Papua (Rudi Hartono).....	475
Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Penguatan Kepemimpinan Pemerintahan (Afrizal)	493
Opini Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Syafhendri)	516
Pengaruh Habitus dan Kapital dalam Kemenangan Kyai Blater Sebagai Bupati (Tunjung Sulaksana)	536
;. Sinergitas Tiga Aktor Utama (Pemerintah, Aktor Privat dan Masyarakat Sipil) dalam Reformasi dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu di Prov Riau dalam perspektif Collaborative Governance (Auradian Martha)	567
Menjaga Marwah Negara di Tapal Batas. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Dalam Perspektif Stakeholder Collaborative Governance (Suswanta).....	586
Sinergitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Dikson Yunus).....	609
Komunikasi Pemerintahan dalam Promosi Layanan Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata di Kota Makassar (Nursaleh Hartaman, A. Luhur Prianto)	617

Seminar Nasional dan Pertemuan APSIPI “ Reformasi dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

Desentralisasi Kewenangan Pusat Daerah dalam Konteks Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintahan Daerah ; Tinjauan dari perspektif paradiplomasi (Mani Festati Broto).....	628
Peran Ombudsman RI dalam Pengawasan Pelayanan Publik (Hamrun, Ahmad Taufik)	645
Peran Aktor Pemerintah Kota dalam Implementasi Pembangunan Hotel di Kota Makassar (Arfan Ashari Saputra, Andi Luhur Aprianto, Muhlis Madani).....	657
Analisis Aspek Pembangunan Berkelanjutan pada Pelaksanaan Program CSR Bina Lingkungan PT.Semen Tonasa (Arif Ansar, Nuryanti Mustari)	671
Peran Pemerintah Daerah dalam Inovasi Pembangunan Pertanian di Kabupaten Bantaeng (Nurkhaerah dan Ahmad Harakan).....	685
Road Map Kebijakan Pengendalian Penduduk di Provinsi Riau (Baskoro Wicaksono)	701
Potret Masyarakat Miskin di Daerah Kaya SDA ; Studi Kasus Implementasi Kebijakan Program Bantuan Keuangan Kepada Kampung di Kabupaten Keerom Propinsi Papua (Bonefasius Bao, Apner Siang)	723

**OPINI MASYARAKAT TERHADAP KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH
DALAM BIDANG INFRASTRUKTUR PEDESAAN**

Syafhendry

Fisip Universitas Islam Riau

email :syafhendry.ip@soc.uir.ac.id

ABSTRAK

Dinamika opini publik dalam sistem politik demokrasi berawal dari adanya teori demokrasi tradisional yang muncul pada abad ke-18 dan 19. Pada awalnya, para pemikir demokrasi mengandalkan suatu situasi sosiopolitik di mana individu menjadi dasar dari badan politik. Hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah merupakan hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Hubungan itu terjalin selalu diawali pada proses demokrasi dalam menentukan siapa yang berhak memerintah. Ketika yang memerintah sudah mendapat hak, maka terbangunlah organisasi pemerintah. Di organisasi pemerintahan inilah hadir seorang pemimpin untuk melaksanakan tugas kepemimpinannya. Kepemimpinan yang dimaksud disini adalah kepemimpinan kepala daerah. Tulisan ini akan menguraikan tentang opini masyarakat terhadap kepemimpinan kepala daerah. Kepala daerah yang dimaksud adalah Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Siak Sri Indrapura. Kepemimpinan mereka menjadi Opini ditengah-tengah masyarakat terkait dengan pemerataan pembangunan di bidang infrastruktur. Infrastruktur yang disoroti masyarakat adalah kebutuhan dasar seperti aliran listrik, penyediaan air bersih dan infrastruktur jalan. Kebutuhan dasar masyarakat ini menjadi tolak ukur atas keberhasilan kepemimpinan kepala daerah. Disamping harmonisasi hubungan antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Keadaan inilah yang menjadi penilaian dan pertimbangan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat dipilih kembali.

Kata Kunci : Infrastruktur pedesaan, Kepemimpinan, Opini Publik.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Berdasarkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia ini adalah untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut maka di susunlah pemerintah secara dan daerah provinsi itu di bagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Kabupaten bertingkat mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Kedudukan Pemerintah Daerah di atur Dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (1) sebagaimana di-jelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah Provinsi dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang di atur dalam Undang-Undang. Untuk merealisasikan maksud pasal 18 tersebut maka di tetapkanlah UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Dari penjelasan diatas terlihat salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum yang mana dimaksud ialah kondisi manusia di mana masyarakat dalam kondisi yang makmur, maka dari itu pemerintah memiliki fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan serta salah satu fungsi pemerintah adalah pemberdayaan.

Sejalan dengan bunyi pasal 18 UUD 1945 diatas, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 2 juga menjelaskan bahwa :Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota; Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan di bagi atas Kelurahan dan Desa.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah juga di jelaskan tentang pembagian urusan pemerintah

dan Daerah, pada bagian ketiga Undang-Undang tersebut yakni urusan pemerintah konkuren, pada pasal 11 menyebutkan (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Terkait dengan urusan pemerintah konkuren diatas maka tulisan ini hanya menyoroti pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu, pekerjaan umum dan penataan ruangan, yang dalam istilah penulis dalam tulisan ini disebut infrastruktur pedesaan.

Masalahnya sekarang adalah dalam masa 5 tahun kepemimpinan seorang kepala daerah yang menjadi perhatian serius bagi masyarakat pada umumnya, khusus masyarakat pedesaan adalah tidak berkembang dan merata pembangunan infrastruktur pedesaan, terutama akses jalan, dan penerangan (listrik).Keluhan oleh masyarakat ini menjadi opini dan persepsi ditengah-tengah masyarakat tentang kepemimpinan kepala daerah. Opini ini berkembang dengan pesat dan menjadi isu santer saat-saat akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah.Yang menariknya adalah kepemimpinan kepala daerah yang menjadi sorotan oleh masyarakat tersebut, ketika yang bersangkutan mencalonkan kembali untuk yang kedua kalinya (incumbent), maka opini yang berkembang menjadi sirna,

infrastruktur yang tertinggal dan tidak merata tersebut terlupakan oleh masyarakat. Inilah kejelian seorang kandidat dalam meraih dan memperoleh suara dukungan masyarakat. Tulisan ini akan menganalisis ketiga kata kunci diatas yaitu Infrastruktur pedesaan, Kepemimpinan, Opini Publik. Pertanyaannya adalah bagaimana opini masyarakat terhadap kepemimpinan kepala daerah terkait pembangunan infrastruktur pedesaan?bagaimana proses pembentukan opini yang terjadi di masyarakat

Prosiding Seminar Nasional dan Pertemuan APSIPI "Reformasi dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan" tentang kepemimpinan?hal apa saja yang mempengaruhi opini masyarakat terhadap kepemimpinan kepala daerah?apakah ada kecenderungan opini masyarakat sengaja dibentuk tentang kepemimpinan kepala daerah?

B. Tinjauan Teoritik

B.1 Pengertian Opini

Opini adalah tanggapan aktif terhadap rangsangan, tanggapan yang disusun melalui interpretasi personal yang diturunkan dan turut membentuk citra. Setiap opini merefleksikan organisasi yang kompleks yang terdiri atas tiga komponen, kepercayaan, nilai, dan pengharapan (Dan Nimmo : 2006). Opini individu muncul sebagai akibat persepsi yang timbul terhadap suatu permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Menurut Leavie, persepsi (perception) dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau penglihatan yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu (Sobur: 2004). Opini berdasarkan penafsiran individu atau setiap orang itu bisa setuju atau tidak setuju atau menimbulkan pro dan kontra. Dengan kata lain, opini publik itu merupakan perpaduan dari opini-opini individu. Opini menurut Cutlip dan Center adalah ekspresi tentang sikap mengenai masalah yang bersifat kontroversial. (Olii dan Erlita : 2011).

Memahami opini seseorang bukanlah hal yang mudah, karena mempunyai unsur-unsur seperti be/ieve (kepercayaan tentang sesuatu), attitude (apa yang sebenarnya dirasakan seseorang), dan perception (R.P Abelson dalam Soemirat dan Ardianto,2012). Bila attitude dimaksudkan sebagai apa yang dinyatakan oleh seseorang melalui pernyataan, maka pendirian atau attitude tersebut sering disebut sebagai sikap yang merupakan opini yang tersembunyi dalam batin seseorang. Pendirian yang diungkapkan dalam bentuk apapun (bahasa tubuh, raut muka ekspresi, warna, pakaian yang dikenakan dan sebagainya disebut opini).

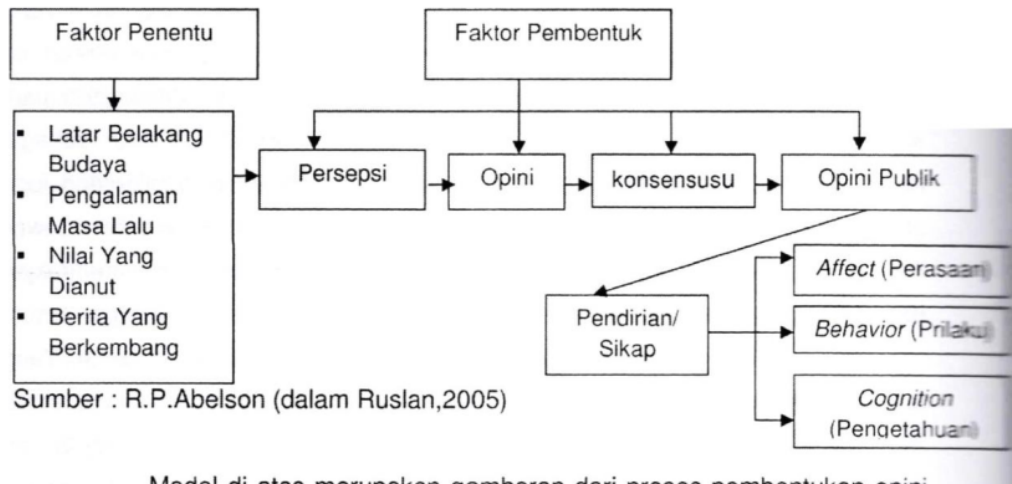
B.2. opini Publik

Pemakaian istilah opini publik dimaksudkan untuk lebih memudahkan pembatasannya, terkadang orang selalu sukar memisahkan arti pendapatan

Inovasi

Proses Pembentukan Opini Publik

Gambar.1



Sumber : R.P.Abelson (dalam Ruslan,2005)

Model di atas merupakan gambaran dari proses pembentukan opini publik, yang diawali oleh 4 faktor penentu seperti latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut dan berita yang berkembang. Keempat hal ini diolah kembali menjadi persepsi. Persepsi yang akan dipengaruhi oleh pendirian dapat membentuk sebuah opini. Opini yang melewati proses konsensus akan segera menjadi opini publik.

Penjelasan singkat terkait proses pembentukan opini publik diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) Persepsi adalah suatu proses memberikan makna, yang sebenarnya merupakan akar dari opini. Persepsi ditentukan oleh faktor-faktor seperti latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, dan nilai-nilai yang dianut, termasuk berita-berita yang berkembang. Ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang baru kali ini dikenalnya, biasanya orang akan segera mempunyai opini. Opini ini muncul karena orang tersebut mempunyai persepsi. Persepsi, antara lain disebabkan oleh kenyataan yang ditemuinya di masa lalu (Kasali, 1994). (2) Opini sendiri mempunyai kaitan yang erat dengan pendirian (attitude). Abelson, dalam Kasali (1994) menyebutkan bahwa opini mempunyai unsur sebagai molekul opini yakni, belief (kepercayaan tentang sesuatu), attitude (apa yang sebenarnya dirasakan seseorang),

perception (persepsi).⁵ Pendirian (attitude) sering disebut sikap, merupakan opini yang tersembunyi di dalam batin seseorang (latent opinion). Pendirian yang diungkapkan, dalam bentuk apapun disebut opini (Soemirat & Ardianto, 2005). (3) Konsensus atas masing-masing individu terhadap suatu opini tertentu biasanya dimulai dari suatu kelompok segmen masyarakat yang paling kecil, kemudian berkembang menjadi kelompok yang lebih luas. Opini yang terkristal menjadi luas itu disebut opini publik.

Siapa yang dimaksud publik, dan apa itu pendapat umum? Apakah pendapat seseorang dapat dianggap sebagai pendapat umum, dan apakah seseorang kandidat bisa mengatasnamakan pendapat umum atau memanipulasinya untuk kepentingan politiknya. Dari beberapa pakar, ternyata di antara mereka juga tidak ada kata sepakat apa yang dimaksud dengan pendapat umum. Tetapi dari beberapa pendapat tersebut secara substansi minimal mengandung arti : Adanya isu diawali ketidaksepakatan, yakni ada yang pro dan ada kontra; Isu melahirkan dua bentuk masyarakat yakni masyarakat yang peduli pada isu tersebut lalu membuat pendapat, sementara masyarakat yang tidak peduli lalu diam.² Menurut Leonard W. Doob dalam Cangara (2016), "suatu isu baru dapat dikatakan pendapat umum setelah masyarakat menyatakan pendapatnya. Sepanjang pendapat itu sifatnya orang per orang, maka ia baru menjadi pendapat pribadi. Tetapi perlu di ketahui bahwa pendapat pribadi tidak bisa dipisahkan dengan pendapat umum, sebab pendapat umum dibangun berdasarkan pendapat perorangan (pribadi) terhadap isu yang di minati oleh orang banyak.

Untuk berkembang menjadi opini publik, opini-opini tersebut melewati sejumlah dimensi waktu, berapa lama waktu yang dibutuhkan sangat tergantung pada unsur emosi anggota segmen masyarakat, kesamaan persepsi, kepercayaan atas isu yang dibicarakan, pengalaman yang sama, tekanan-tekanan dari luar, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sumber berita. Dimensi cakupan (luasnya publik), dimensi pengalaman; masa lalu khalayak khalayak umumnya pernah memiliki suatu pengalaman tertentu atas objek yang dibicarakan.²² Pengalaman masa lalu ini biasanya diperkuat oleh informasi lain. Pengalaman masa lalu di ekspos oleh hal-hal yang dialami sendiri maupun di dengar atau dibaca dari sumber lain. Makin tinggi dan sama pengalaman masing-masing

individu akan semakin besar pula kemungkinan terjadinya konsensus
diantara mereka. Dimensi Media massa; konsensus biasanya akan
berkembang lebih pesat lagi

Inovasi

apabila suatu kejadian diekspos oleh media massa. Bahkan, media massa sering disebut sebagai alat pembentukan opini publik. Dimensi tokoh; hampir dalam setiap kasus selalu tampil seorang tokoh. Konsensus yang muncul biasanya amat tergantung pada tokoh yang menangani kasus tersebut. (4) pendirian mempunyai tiga komponen pembentuk yang dikenal sebagai A-BC of Attitude. (a) Affect atau perasaan (emosi) komponen afektif merupakan elemen evaluasi dalam unsur pendirian berdasarkan seseorang untuk menilai sesuatu: baik atau buruk. (b) Behavior atau perilaku merupakan komponen untuk menggerakkan seseorang secara aktif untuk melakukan tindakan atau berperilaku atau suatu reaksi yang sedang dihadapinya. Seperti memukul, menghancurkan, menerima, atau menolak. (c) Cognition atau pengertian (penalaran) komponen ini berkaitan dengan penalaran seseorang untuk menilai sesuatu informasi, pesan, fakta dan pengertian yang berkaitan dengan pendiriannya. Komponen ini menghasilkan pengertian dari seseorang berdasarkan rasio atau kemampuan penalarannya (Kasali, 1994).

B.3. Kepemimpinan

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan. Pemimpin lebih menggambarkan figure seseorang sedangkan kepemimpinan lebih cenderung kepada sifat, watak, tabiat dan kecakapan yang ditampilkan dalam mengendalikan diri dan mengelola orang lain dalam konteks mencapai tujuan individu maupun organisasi. Pemimpin terbingkai dalam tujuan individu, pribadi, sedangkan kepemimpinan berorientasi pada kepentingan institusi dan lembaga baik bersifat informal maupun organisasi yang bersifat formal. Esensinya yaitu tujuan individu berimpit dengan tujuan organisasi, semakin baik dan besar profit organisasi, maka berimbas kepada kesejahteraan individu sebagai anggota organisasi (Effendy : 2009)

Kata pemimpin/leader mempunyai arti dan defenisi yang bermacam-macam. Defenisi mengenai pemimpin yang banyak sekali, yaitu sebanyak pribadi yang meminati masalah pemimpin tersebut. Karena itu kepemimpinan merupakan dampak interaktif dari faktor individu dengan faktor situasi. Pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya, untuk melakukan usaha bersama mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu (Kartono, 2008).

Betapa pentingnya pemimpin dan kepemimpinan dalam suatu kelompok jika terjadi suatu konflik atau perselisihan diantara orang-orang dalam kelompok, maka orang-orang mencari cara pemecahan supaya terjamin keteraturan dan dapat ditaati bersama. Kepemimpinan yang tepat juga mendukung proses pembangunan pada suatu pemerintahan, dimana ketepatan dalam proses pembagian tugas dan wewenang secara tepat secara langsung akan membantu proses pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Ordway Tead dalam bukunya *The Art of Leadership* menyatakan kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan (dalam Kartono, 2008). Kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Di satu pihak, manusia terbatas kemampuannya untuk memimpin, di pihak lain ada orang yang mempunyai kelebihan kemampuan untuk memimpin. Di sinilah timbulnya kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan. Kartono mengatakan persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu: pertama kekuasaan, yaitu otoritas dan legalitas yang memberikan kewenangan kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu; kedua kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.; ketiga kemampuan, yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/keterampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa. (Pasolong, 2008)

Seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan baik sehingga nanti akan tercapai maksud dan tujuannya. Komunikasi pemimpin dalam penyampaian pesan-pesan tentu tidak terlepas dari

Prosiding Seminar Nasional dan Pertemuan APSIPI "Reformasi dan
Tata Kelola Pemerintahan"

adanya umpan balik dari pegawai. Sebaliknya jika tidak terjadinya komunikasi, maka sulit untuk menjalankan visi misi yang ada. Oleh karena itu seorang pemimpin harus benar-benar, memperlihatkan komunikasi yang disampaikan dan

L--ovasi

begitu juga dengan pegawai harus mampu melakukan komunikasi sehingga terjadi proses yang efektif.

B.4. Infrastruktur

Pengertian Infrastruktur, menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005). Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah.

Sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur berpengaruh terhadap sistem tata guna lahan yang pada akhirnya membangun suatu kegiatan. Hubungan pembangunan infrastruktur terhadap sistem tata

guna lahan tersebut ditegaskan oleh Grigg dan Fontane (2000).Rekayasa dan Manajemen Infrastruktur dalam memanfaatkan sumberdaya dalam rangka pemanfaatan untuk transportasi, infrastruktur perairan, limbah, energi, serta bangunan dan struktur membentuk dan mempengaruhi sistem ekonomi, sosial-budaya, kesehatan dan kesejahteraan.

¹³ Moenir (1992) mengemukakan bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja .Sebagai suatu sistem yang ¹⁶ terdiri dari banyak komponen maka perencanaan infrastruktur harus mempertimbangkan keterkaitan dan keterpengaruhannya antar komponen, beserta dampak-dampaknya. Perencanaan infrastruktur merupakan proses dengan kompleksitas tinggi, multi disiplin, multi sektor, dan multi user.

C. Pembahasan

C.I Pendapat Umum : Tinjauan Masa lalu

Sesudah Lyndon Baines Johnson, presiden pengganti John F. Kennedy mengirim setengah juta orang berperang di Vietnam, dia menemukan pendapat umum berbalik menentang kebijakannya. Setelah itu, Johnson mengumumkan bahwa ia tidak ingin lagi mencalonkan diri jadi presiden pada periode berikutnya, dia memilih untuk istirahat diladang peternakannya di Texas. Penggantinya Richard Nixon, yang diterpa skandal Watergate, tiba-tiba popularitasnya di mata publik melorot jauh menjadi 40 poin dan berakhir dengan pengunduran dirinya sebagai presiden setelah di impeach oleh Kongres. Demikian pula ketika Jimmy Carter didera kasus inflasi dalam negeri dan penyanderaan para diplomat Amerika di Iran, merosot popularitasnya sehingga dukungan publik beralih ke Ronald Reagan yang menjadi Presiden Amerika Serikat ke 40.

Dalam sejarah kekuasaan tidak ada pemerintahan yang bisa bertahan tanpa dukungan rakyat. Kekuasaan seorang raja atau presiden bagaimanapun kuatnya akan runtuh manakala rakyatnya sudah tidak mendukung pemerintahannya. Jatuhnya presiden Idi Amin di Uganda, kaisar Haila Silassie di Ethiopia, presiden Ersyad di Banglades, presiden Marcos di Filipina, presiden Saddam Husein di Irak adalah bukti sejarah bahwa kekuasaan bisa di tumbang oleh kehendak orang banyak,

Prosiding Seminar Nasional dan Pertemuan APSIPI "Reformasi dan Tata Kelola Pemerintahan" sekalipun pemerintahan itu dijalankan dengan cara-cara diktator (Cangara : 2016)

⁹ Praktek pendapat umum sebenarnya sudah berlangsung lama, sejak Negara-negara kota di Yunani melaksanakan pemunggutan suara secara Inovasi

langsung untuk melihat suara mayoritas. Para penduduk kota mengacungkan tangannya untuk menyatakan setuju atau tidak terhadap suatu isu yang dipermasalahkan oleh banyak orang. Tetapi karena praktik komunikasi sekarang tidak lagi dilakukan secara langsung seperti halnya di Yunani, melainkan sudah melalui media massa seperti surat kabar dan media elektronik.

²¹ Pendapat umum modern baru mulai menjelang berakhirnya abad ke-19, ketika surat kabar New York Herald melakukan interviu kepada sejumlah penduduk kota untuk memprediksi hasil pemilihan walikota New York, lalu di susul surat kabar-surat kabar di Cincinnati, Chicago dan St. Lois pada tahun 1908. Sejalan upaya untuk mengetahui pendapat orang banyak, Lawrence Loweeel menerbitkan buku Public Opinion and Popular Government (1919), sebagai buku pertama yang membicarakan tentang pendapat umum, disusul buku public Opinion karya Walter Lippman (1922). Sejak itu studi tentang pendapat umum modern dalam bentuk kajian maupun dalam bentuk kuliah sudah mulai diberlakukan di universitas-universitas Amerika oleh para ilmuan politik, sosiologis, psikologi sosial.

Setelah berlangsung kurang lebih setengah abad pendapat umum menjadi kajian studi dan bahan riset di Amerika Serikat. Pendapat umum makin banyak mendapatkan perhatian di Negara-negara di mana demokrasi bergulir. Perhatian yang begitu besar bukan saja dalam rangka penentuan kandidat yang harus diukur tingkat penerimaan massa, tetapi juga dalam hal pengambilan keputusan dan pelayanan public yang merugikan masyarakat. Di Indonesia, sekarang banyak kebijakan tentang pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk kepentingan public yang harus ditunda pelaksanaannya, karena mendengar suara rakyat yang disampaikan dalam bentuk protes atau unjuk rasa. Protes dan unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk pernyataan pendapat umum yanag tidak lagi dinyatakan dalam media, tetapi dalam bentuk aksi.

C.2. Opini Kepala Daerah :Faktor Pembentukan

Pembahasan ini menggunakan skema atau kerangka pemikiran dari teori R.P.Abelson. Sebelumnya kita lihat dulu proses terbentuknya melalui faktor penentunya yaitu latar belakang, berdasarkan hasil dari pengalaman

dilapangan bahwa latar belakang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan opini. Karena pada umumnya masyarakat menilai jika adanya kesamaan latar belakang budaya memiliki kedekatan emosioal yang tinggi. Artinya masyarakat merasa kedekatan batin itu terasa dekat karena dari suatu golongan yang sama.

Jika dilihat dalam pengalaman masa lalu, banyak pasangan kepala daerah yang harmonis sangat disukai Oleh masyarakat dengan gaya kepemimpinannya yang demokratis, dekat dengan masyarakat, berwibawa, kepala daerah yang menjadi inspirasi dalam pembangunan infrastruktur. Keadaan seperti ini sangat dirasakan masyarakat secara umum dan bernilai positif karena pemimpin yang mudah berbaur. Berkaitan dengan itu nilai yang dianut menjadi nilai tambah Oleh masyarakat, karena secara moral maupun moril kepemimpinan pasangan kepala daerah dinilai cukup baik dimata masyarakat, apabila tidak tersandung masalah hukum, jika keadaan ini bisa bertahan hingga masa kepemimpinan periode pertama, maka dukungan masyarakat untuk maju pada periode berikutnya semakin kokoh.

Disamping itu, masyarakatpun selalu mendapatkan berita yang berkembang dari berbagai sumber, baik itu dari media elektronik yang menyiarkan informasi seputar kepemimpinan kepala daerah dengan prestasi yang didapat. Hal ini sangat disukai Oleh masyarakat, karena daerahnya bisa masuk ke dalam siaran nasional sehingga menjadi ajang promosi bagi daerah mereka. Berdasarkan dari faktor penentu tersebut menimbulkan persepsi masyarakat yang memberi rasa simpati yang tinggi karena kinerja yang dilaksanakan selama ini dinilai cukup baik. Sehingga membentuk Opini individu yang positif. Faktor penentu opini masyarakat bernilai positif terhadap kepemimpinan seseorang kepala daerah atau pasangan kepala kepala daerah dalam satu kali periode kepemimpinan adalah (a) pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan termasuk penerangan (listrik) yang dapat dirasakan langsung Oleh masyarakat; program-program pro kerakyatan, termasuk pemberdayaan yang selalu

diprioritaskan. (b) kepemimpinan kompak (akur) antara kepala daerah dan wakil kepala daerah apalagi kemudian keduanya mencalon lagi untuk periode ke dua dengan komposisi yang sama.

Inovasi

Dalam pembahasan ini berawal dari pendirian sikap yaitu adanya affect (Perasaan). Berdasarkan fakta empirik dilapangan, bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasangan kepala daerah masih tinggi, dan bahkan mereka berharap untuk kedepannya bisa lebih baik. Diharapkan untuk periode kedepannya mereka mampu menjaga kepercayaan masyarakat, dan melaksanakan program-program yang belum terlaksana. Dari adanya perasaan (affect) tersebut, maka akan melahirkan tingkahlaku (behavior) yang memiliki komponen apakah seseorang itu setuju atau tidak, menolak atau menerima terhadap apa yang dilaksanakan oleh pasangan kepala daerah. Namun dari banyak kajian didapati bahwa masyarakat secara umum menerima dengan program-program yang dibuat kepala daerah. Dari tingkahlaku sudah positif, akan melahirkan pula Pengetahuan/nalar (cognition) berkaitan dengan penalaran seseorang untuk menilai sesuatu informasi, pesan, fakta, dan pengertian yang berkaitan dengan penalarannya. Jika perasaan, tingkahlaku, dan pengetahuan dinilai positif maka tindakan masyarakat cenderung memilih petahana.

Berdasarkan fakta di lapangan, opini yang berkembang pada awalnya sangat negatif terhadap kepemimpinan pasangan kepala daerah, kadangkala persepsi ini di pengaruhi oleh isu-isu pemerataan pembangunan bidang infrastruktur di segala bidang sangat tertinggal. Harapan masyarakat daerah mereka lebih diperhatikan dengan memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi sejalan dengan rentang waktu, opini tersebut berubah dan berbanding terbalik dengan opini sebelumnya. Dahulu banyak yang kontra siapapun yang memimpin daerah ini, kampung kita akan tetap seperti ini, tak ada perubahan kemajuan. Namun sekarang malahan banyak yang pro dengan kepemimpinan pasangan incumbent dan mendukung program-program yang dibuat dalam incumbent, dan masyarakat akan optimis kalau daerah mereka akan merasakan

pemerataan pembangunan infrastruktur pedesaan. Perubahan sikap opini seperti ini, dapat dianalisis dengan komponen teori ABC'attitudes, yaitu :Affect (Perasaan).

Dalam komponen ini masyarakat merasakan kepemimpinan ini telah membawa perubahan dengan program-program yang telah mereka buat bersama untuk pembangunan. Masyarakat sangat senang karena telah memberi arti bagi mereka lewat pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, air bersih dan bidang lainnya, walaupun ada beberapa yang belum seperti jaringan instalasi listrik yang sangat mereka harapkan dari dulu. Kepemimpinan yang serasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, cukup membawa perubahan pada perkembangan daerah, apalagi pada periode pertama menunjukkan pesatnya pembangunan. Dengan pembangunan yang diberikan pada periode pertama masyarakat masih cukup berharap dengan periode yang kedua untuk lebih merasakan pemerataan yang sama dengan daerah lain. Disinilah peran opini bermain, membuat isu-isu strategis untuk mempengaruhi masyarakat pemilih.

Jika nilai-nilai Affect (Perasaan) dapat dirasakan oleh masyarakat maka tindakan selanjutnya adalah Behavior (tingkah laku), dalam komponen ini walaupun ada sebagian yang mendukung tentu ada juga yang menolak. Karena kecewa dengan periode pertama saat menjanjikan sesuatu yang belum terpenuhi, maka keadaan ini dapat membuat masyarakat mengambil langkah untuk mendukung atau tidak mendukung. Dalam keadaan kritis, pilihan-pilihan isu terbentang luas, semakin tingginya pendidikan masyarakat, merupakan faktor yang menyebabkan pentingnya peranan isu dan program (Syafhendry, 2016). Beberapa penilaian miring masyarakat terhadap calon kepala daerah dapat diatasi dengan membangun opini Cognition (pengertian/penalaran). Dalam komponen ini masyarakat menyadari akan keterbatasan seseorang dalam memimpin karena itu masyarakat masih punya harapan besar terhadap petahana untuk membangun infrastruktur yang lebih baik. Jika kepemimpinannya telah merangsang komunikasi tentang suatu isu, maka terbentuklah interpretasi personal. Kita telah melihat bahwa dengan melalui interpretasi, orang memperhitungkan pertikaian dan isu serta membuat citra dalam membantunya. Seperangkat citra yang

— dirumuskan merupakan gambaran tentang tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain serta apa yang mereka cenderung untuk

Prosiding Seminar Nasional dan Pertemuan APSIPI "Reformasi dan
Tata Kelola Pemerintahan"

melakukannya. Melalui sampling personal, orang menjadi tahu tentang
opini orang lain yang berada di luar lingkungan kenalan langsung mereka
(Davison :1958).Salah satu yang membuat masyarakat ber-opini positif
terhadap incumbent untuk dapat di pilih kembali ialah mereka tidak
terlibat kasus korupsi dan program kerja mereka berorientasi kepada
pembangunan

infrastruktur pedesaan. Tanpa ada kepedulian kepala daerah membangun desa, maka desa tetap saja suatu kawasan yang tertinggal dan terkebelakang.

C.3. Mengukur Pendapat Umum (public opinion)

Untuk apa pendapat masyarakat atau pendapat umum di ketahui? ¹⁸ Bagi suatu Negara yang menganut prinsip keterbukaan dalam berdemokrasi, pendapat umum sangat diperhatikan oleh setiap aparatur Negara atau pejabat publik, sebab keputusan yang mereka ambil harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam konteks komunikasi politik, jajak pendapat menempati posisi penting untuk mengukur dan menganalisis pendapat umum di Negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Bisa dikatakan di Negara-negara tersebut tidak ada penggantian kepala Negara dan atau kepala daerah yang luput dari bidikan polling. Bagi para pemimpin Negara, pemimpin daerah, pemimpin politik, atau para kandidat yang ingin bertarung dalam pemilihan, umumnya menggunakan jasa jajak pendapat untuk mengetahui sejauhmana kekuatan dukungan massa terhadap citra para kandidat. Jajak pendapat bagi masyarakat Amerika Serikat boleh dikatakan sudah menjadi bagian dari budaya demokrasi mereka. Begitu tingginya tingkat kepercayaan mereka terhadap hasil jajak pendapat (polling), sehingga hampir semua calon presiden 2/3 calon Senator dan 3/4 calon gubernur di Amerika Serikat menggunakan perusahaan jajak pendapat profesional untuk melihat pergerakan pendapat umum terhadap dirinya. Banyak diantara mereka percaya hasil jajak pendapat itu, tetapi banyak juga yang mengacuhkan, terutama jika hasil jajak pendapat tidak sesuai dengan pikiran mereka.

Opini publik memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan demokrasi. Tidak heran jika kelompok-kelompok politik berusaha menanamkan citra positif melalui jejak pendapat. Pendapat umum memiliki dua dimensi, yaitu dimensi preferensi dan dimensi

Prosiding Seminar Nasional dan Pertemuan APSIPI "Reformasi dan
Tata Kelola Pemerintahan"

intensitas. Dimensi preferensi adalah mengukur pilihan terhadap alternatif yang ada, sedangkan dimensi intensitas adalah mengukur bagaimana kuatnya pilihan itu terhadap alternatif yang ada. Sebagian besar para kandidat menilai pendapat umum sangat menentukan, namun bagaimana cara memperoleh dukungan pendapat umum, itu yang menjadi persoalan. Di Negara-negara yang menganut sistem otoriter pada umumnya pemerintah tidak menghargai pendapat umum, sebaliknya bagi Negara-negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi sangat concern terhadap pendapat umum. Di Negara yang menganut asas demokrasi, pendapat umum bisa tumbuh dengan baik, karena pendapat umum menjadi the five branch of government yang harus didengar. Tanpa mendengarkan pendapat umum pemerintah akan kehilangan dukungan, sebab kepekaan pada pendapat umum merupakan hal yang sangat esensial dalam demokrasi.

Dalam kaitan dengan pemilihan pejabat publik, apakah itu presiden, gubernur atau bupati, maka jajak pendapat dibutuhkan untuk keperluan : (a) sarana bagi kandidat untuk memperkenalkan dirinya ke publik, atau kepada partai yang akan mengusung calon. Selain itu jajak pendapat bisa menaikkan pamor kandidat, apabila ternyata hasil jajak pendapat banyak mendukungnya; (b) Membantu kandidat untuk mengetahui isu apa yang di dukung oleh publik; (c) membantu kandidat untuk mengetahui bukan saja apa yang diinginkan publik, tetapi juga bagaimana publik menilai kandidat; (d) menjadi bagian dari strategi kampanye dimana jajak pendapat tidak hanya memberikan informasi kepada publik, tetapi juga citra diri yang diinginkan publik. (e) disamping dapat mengukur kekuatan kandidat di depan publik, juga dapat mengukur secara akurat bagaimana persepsi publik terhadap lawan politik. (Eriyanto :1999).

D. Penutup

D.I Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat tarik kesimpulan bahwa Opini publik itu melibatkan komunitas terorganisasi, budaya politik, dan konsensus politik. Terkait dengan kepemimpinan kepala daerah, tugas pemerintah bukan menyatakan kehendak rakyat, melainkan memberlakukan penyesuaian di antara berbagai kehendak dan tujuan khusus yang pada setiap waktu tertentu mendesak untuk diwujudkan. Kehendak dan tujuan khusus ini di refleksikan dalam sekelompok kecil opini yang berkembang di

dalam publik yang lebih besar yang tidak berpengetahuan dan tidak
atentif. Sebaliknya opini rakyat berakhir dangkal, ciptaan sekadar
kumpulan orang banyak,
Inovasi

berakar dalam mode atau keisengan dan dapat cepat berubah dan
bertingkah, mudah terbentuk lemah di sekitar isu tersendiri atau seorang
tokoh, tidak memiliki jenis pengikat yang hanya dapat diberikan oleh
waktu, tradisi, dan konvensi. Akhirnya, opini yang telah terbentuk di
tengah-tengah masyarakat tentang isu negatif seorang kepala daerah yang
belum dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur, akan berbalik
arah mendukung petahana, jika petahana memang tidak terlibat korupsi,
dan selama masa periode pertama antara kepala daerah dan wakil kepala
daerah selalu akur hingga akhir masa jabatannya, keadaan inilah penyebab
isu negatif menjadi isu positif walaupun harapan masyarakat akan
pembangunan infrastruktur belum mereka nikmati.

D.2. Saran

Disarankan kepada kepala daerah agar memperhatikan pembangunan
infrastruktur pedesaan. Apalagi pembangunan itu telah dijanjikan pada
masa kampanye sewaktu pemilu kepala daerah dilakukan. Untuk
mengatasi opini yang berkembang ditengah-tengah masyarakat terhadap
suatu isu yang melanda kepala daerah, maka sebaiknya kepala daerah
melakukan komunikasi intensif guna memberikan penjelasan terhadap
suatu isu yang beredar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. 1997. Uraian2 Sosiologis (bunga rampai 1). Medan:
Jurusan Sosial Fakultas Hukum USU.
- Cangara, Hafiel, 2016, Komunikasi Politik, RajaGrafindo Persada,
Jakarta Davison, W. Philips, 1958, The Public Opinion Process, Public
Opinion Quardterly 22.

- Prosiding Seminar Nasional dan Pertemuan APSIPI "Reformasi dan Tata Kelola Pemerintahan"
Effendy, Khasan, 2009, Pergeseran Kepemimpinan Desa Kharismatik, Paternalistik, Otokratik, Demokratik, CV. Indra Prahasta, Bandung
- Eriyanto, 1999, Metodologi Pol/ing : Memberdayakan Suara Rakyat. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Herimanto, Bambang Dkk. 2007. Publik Relations Da/am Organisasi. Yogyakarta: Santusta.
- Kartini, Kartono, 2008, Pemimpin dan kepemimpinan RajaGrafindo, Jakarta
- Lowell, A. Lawrence, 1919, Public Opinion and Popular Government, Longmans, Green, New York
- Olii, Helena. Erlita Novi. 2011. OpiniPublik (edisikedua). Jakarta: PT Indeks.
- Ninmo, Dan D. 2000. Komunikasi Politik:Komunikator, Pesan dan Media. Bandung: Rosdakarya.
- Nisbet, Robert, 1975, Public Opinion Vernus Popular Opinion, The Public Interes 41.
- Ruslan, Rosady. 2004. Manajemen Publik Relations dan Media Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemirat dkk. 2004. Opini Publik. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Sobur, Alex. 2004. Analisis Teks Media Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soemirat, Ardianto. 2004. Dasar-dasar Publik Relations. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syafhendry, 2016, Perilaku Pemilih teori dan Praktek, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Dokumentasi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

proseding_nasonal11.pdf

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.scribd.com Internet Source	1%
2	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
3	vdocuments.mx Internet Source	1%
4	publication.petra.ac.id Internet Source	1%
5	ojs.uma.ac.id Internet Source	1%
6	read.bookcreator.com Internet Source	1%
7	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to University of North Georgia Student Paper	1%
9	etd.umy.ac.id Internet Source	1%
10	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%

11	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	1 %
12	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
13	id.123dok.com Internet Source	1 %
14	nanopdf.com Internet Source	1 %
15	ejournal.uika-bogor.ac.id Internet Source	1 %
16	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
17	caraun.blogspot.com Internet Source	1 %
18	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1 %
19	smpn4lehitubarat.blogspot.com Internet Source	1 %
20	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
21	adm.fisip.unpatti.ac.id Internet Source	1 %
22	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
23	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On